

**SINERGITAS KODIM 0402/OKI DENGAN PEMDA OGAN KOMERING ILIR
DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT
DAN KABUT ASAP DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA
TAHUN 2015**

**SYNERGY OF KODIM 0402 / OGAN KOMERING ILIR AND LOCAL
GOVERNMENT OF OGAN KOMERING ILIR IN EMERGENCY HANDLING OF
PEATLAND FIRES AND SMOKE HAZE IN OGAN KOMERING ILIR REGENCY IN THE
YEAR OF 2015**

Hirta Juni Adriansyah¹

Universitas Pertahanan Indonesia

(hirta15@gmail.com)

Abstrak -- Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Propinsi Sumsel pada tahun 2015 mencapai 466 titik dan mayoritas terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencapai 376 titik. Pada saat itu kebakaran di wilayah Kabupaten OKI merupakan lokasi yang paling sulit untuk dipadamkan. Kodim 0402/OKI merupakan Satuan Komando Kewilayahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas TNI-AD di wilayah Kabupaten OKI. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemda bersama Kodim dan komponen masyarakat lainnya dalam menangani bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap, akan tetapi kritikan tentang kinerjanya masih sering dijumpai diantaranya pemerintah daerah dinilai terlambat dalam upaya pemadaman kebakaran lahan. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi sinergitas Kodim dan Pemda OKI dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap agar lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Tujuan penelitian menganalisis Sinergitas Kodim 0402/OKI dengan Pemda OKI dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap pada tahun 2015. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya sinergitas Kodim dan Pemda OKI karena ada kelemahan-kelemahan yang belum dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini terkendala dengan masih belum memadainya peralatan yang dibutuhkan pada saat penanganan bencana kebakaran, masih belum adanya SOP yang baku dalam penanganan bencana kebakaran hutan di wilayah Kabupaten OKI. Selain itu, Karakteristik wilayah Kabupaten OKI menyimpan potensi bencana kebakaran lahan yang besar.

Kata Kunci: Sinergitas, Penanganan kebakaran lahan

¹ Mayor Inf. Hirta Juni Adriansyah adalah mahasiswa Program Studi Magister Strategi Pertahanan Darat Cohort-4, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Abstract -- Forest and land fires that occurred in the province of South Sumatra in 2015 reached 466 points and casualties in the Ogan Komering Ilir (OKI) which reached 376 points. At that time the fire in the OKI regency is the most difficult location to extinguish. Kodim 0402 / OKI is a Regional Unit of Command which is directly related to the implementation of TNI-AD duties in OKI Regency. Various efforts that have been implemented by local government along with Kodim and other community components in handling peat fires and smoke haze disaster, will like criticism about its performance is still often encountered by certain local governments late in efforts to fire the land fires. Therefore, it is necessary to optimize the synergy of Kodim and the OKI Local Government in the emergency handling of peatland fires and smoke haze to be faster, accurate, effective and efficient. The purpose of research analysis of Synergy of Kodim 0402 / OKI with OKI Local Government in the emergency handling of peat land fires and smoke haze by 2015. The research used qualitative method with case study approach. The result of the research shows that the cause factor is not optimal synergy of Kodim and Local Government of OKI because there are weaknesses that have not been favored by both parties. This is constrained by the inadequacy of the equipment required in the handling of fire disasters, there is still no standard SOP in the handling of fire disaster in OKI Regency area. In addition, the characteristics of OKI Regency region have great potential for land fires.

Keywords: Synergy, Handling of land fire

Pendahuluan

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Kebijakan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pelibatan investor swasta untuk melakukan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam. Ditambah lagi tingginya laju penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh perkebunan dengan mengkonversi hutan, disampaikan oleh Kartodihardjo (sebagaimana dikutip dalam Hidayah, 2016). Kawasan hutan di Indonesia mengalami kerusakan dan degradasi dari

waktu ke waktu sebagian besar disebabkan oleh aktifitas manusia di antaranya berupa kebakaran hutan dan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan². Pada tahun 2015, kebakaran lahan dan hutan yang melanda Indonesia sangat parah. Hal tersebut terjadi karena ketahanan ekosistem lebih rentan terhadap kebakaran karena hutan sudah didegradasi oleh hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Kondisi ini menjadikan beberapa wilayah di Indonesia dilanda bencana kabut asap (Kanisius, 2016).

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Propinsi Sumatera Selatan

² Irwanto (2012) Kerusakan hutan di Indonesia diakses dari https://www.irwantoshut.com/kerusakan_hutan_indonesia.html

pada tahun 2015 cukup parah mencapai 466 titik dan mayoritas terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencapai 376 titik. Pada saat itu kebakaran di wilayah Kabupaten OKI merupakan lokasi yang paling sulit untuk dipadamkan (Majalah detik, 2015). Berdasarkan pada keterangan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Ahmad Taufik, sepanjang tahun 2006 hingga 2014 kebakaran hutan dan lahan melanda daerah Ogan Komering Ilir telah mengakibatkan rusaknya satu juta hektare dari 1,4 juta hektar lahan gambut. Selain itu, data sampai dengan 10 November 2015, tercatat 612.833 hektare lahan terbakar dan dari perhitungan satelit Citra Landsat, kebakaran hutan yang melanda hampir 613 ribu hektare tersebut, banyak terjadi di Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir dan Banyuasin. Dari ribuan hektare lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir inilah pekatnya kabut asap terbawa hingga ke Riau, Jambi, Medan, bahkan Banda Aceh.

Dalam menanggulangi kebakaran hutan, merujuk pada penjelasan Undang

Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, tercantum bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dilakukan dengan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satu dari 14 tugas-tugas TNI dalam OMSP adalah “Membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi”. Dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana, Buku Pedoman Penanggulangan Bencana Alam

di Darat (Perkasad Nomor 96/XI/2009 tanggal 30 November 2009) memperjelas peran TNI AD di dalam penanggulangan bencana alam di daerah yaitu masing-masing Kowil sesuai dengan tingkatannya menyiapkan Satu Satgas PRC PB (Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yang langsung di bawah Komando Operasi Pangdam/Danrem/ Dandim. Dalam melaksanakan Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintah Daerah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 pada Poin 4. c. 1) yang mengatur tentang Tugas Bantuan TNI dalam mengatasi akibat bencana alam.

Dalam rangka peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang juga mengatur tentang fungsi TNI dalam memberikan bantuan terhadap tugas-tugas pemerintah di daerah dalam penanggulangan/ pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan.

Kodim 0402/OKI yang berlokasi atau terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir,

merupakan Satuan Komando Kewilayahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas TNI AD di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai Satuan komando kewilayahan, Kodim mempunyai tugas Pembinaan Teritorial terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kodim 0402/OKI meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Mencermati tugas pokok tersebut dihadapkan perkembangan situasi wilayah khususnya wilayah Kabupaten Ogan Komering yang mempunyai lahan gambut yang luas yaitu sekitar 570.000 hektar³, dimana pada musim kemarau sangat rawan terhadap kemungkinan kebakaran, menuntut Kodim 0402/OKI sebagai satuan komando kewilayahan perlu ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Upaya penanggulangan bencana merujuk pada undang-undang yang mengatur fungsi Pemda dan TNI dalam penanggulangan bencana, bersifat tanggap

³Wijaya, Taufik (2014) Mengapa Kebakaran Lahan Gambut di Sumsel Tak Kunjung Usai? Inilah Ulasannya diakses dari <http://www.mongabay.co.id>

darurat yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Upaya ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir agar kebakaran yang lebih luas dapat dicegah. Upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui Keputusan Gubernur Sumsel No.215/KPTS/BPBD.SS/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut diikuti oleh Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Ogan Ilir, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Baturaja, Bupati Muara Enim. Salah satu kebijakannya adalah Pembentukan Pos Komando Satu Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumsel tahun 2015 melalui keputusan Gubernur Sumsel No. 514/KPTS/BPBD.SS/2015 tanggal 10 Juni 2015.

Pada kenyataannya, upaya pemerintah Sumsel untuk bebas dari bencana kabut asap pada tahun 2015 masih menghadapi kendala. Upaya

penanggulangan dan pencegahan yang juga melibatkan Kodim 0402/OKI mengalami berbagai kendala karena titik-titik api kerap kembali muncul baik di tempat yang sama maupun tempat yang berbeda. Pada 6 Oktober 2015, titik panas di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdeteksi paling banyak, yakni mencapai 376 titik (Abdullah, 2015). Upaya penanggulangan yang telah dilakukan yaitu melakukan pemadaman melalui udara dan darat (Erwanto, 2015). Kekhawatiran akan ancaman bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menghantui di tahun 2017 ini dan tahun-tahun mendatang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan dianggap masih belum maksimal. Masih terdapat berbagai kekurangan dan keterlambatan dalam proses penanganan bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini diasumsikan karena masih terdapat tumpang-tindih peran antar instansi pemerintahan. Peran serta semua pihak dalam penanggulangan bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap

belum terkoordinasi dengan baik, sehingga penanganannya belum terlaksana secara maksimal. Koordinasi antara BPBD, Kodim 0402/OKI, SKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir masih belum berjalan secara sinergis, sehingga ketika bencana terjadi, respon untuk menanggulangi bencana belum terlaksana dengan baik (Renstra BPBD Sumsel 2013-2018) dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan pribadi (Rosana, 2015). Selain itu, kritikan terhadap kinerja Pemerintah dalam penanganan bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap masih sering dilontarkan oleh DPR yang menyatakan bahwa reaksi pemerintah selalu terlambat memberi bantuan, kerja Pemerintah baik itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah gagal. Karena proses penanganan dan evakuasi untuk warga terlalu lambat (Budi, 2015).

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kontribusi yang belum optimal dari masing-masing dinas yang terkait, termasuk Kodim 0402/OKI yang membantu dalam penanganan bencana belum optimal. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan jika

tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak pada ketahanan suatu wilayah. Ketahanan wilayah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten akan menunjang bagi ketahanan nasional. Ketahanan wilayah dari suatu daerah dapat dilihat dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Terwujudnya ketahanan wilayah dipengaruhi oleh stabilitas keamanan dari daerah itu sendiri. Stabilitas keamanan akan terganggu jika daerah sedang menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Dalam perspektif Strategi Pertahanan Darat, ancaman non militer yang dimaksud yaitu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak kepada terganggunya stabilitas keamanan dan roda pemerintahan di daerah, sehingga perlu ada upaya dan tindakan nyata dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat memberikan efek terjaminnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Penelitian tentang kebakaran hutan dan lahan sebelumnya sudah dilakukan

oleh beberapa peneliti. Penelitian oleh Mayor Czi Widya Wijanarko (2016) “Peran Satuan Denzipur 8/Gawi Manuntung dalam rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Gambut di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.” Peneliti lebih memfokuskan kepada peran Satuan Denzipur 8/Gawi Manuntung dalam rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Gambut di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Pelaksanaan tugas Denzipur 8/GM dalam rangka pembangunan konstruksi canal blocking (sekat kanal) untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan di Kabupaten Pulang Pisau dapat terlaksana dengan baik disebabkan adanya koordinasi yang baik antara satuan Denzipur 8/GM sebagai pihak pelaksana dengan satuan kewilayahan dan Pemda setempat.

Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada persoalan sinergitas Kodim 0402/OKI dengan Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir pada penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2015. Sinergi berarti bahwa dengan bekerjasama dan

saling berhubungan, bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi akan menjadi lebih produktif dibandingkan kalau mereka bertindak sendiri-sendiri (Stoner dan Freeman, 1992). Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan analisa mengenai kondisi wilayah yang menjadi potensi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganannya serta kapasitas yang dimiliki Kodim 0402/OKI dalam pencegahan, penanganan bencana dan akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang sinergitas antara Kodim 0402/OKI dengan Pemda Ogan Komering Ilir dalam penanganan bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap, mengingat bahwa ancaman bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih berpotensi terjadi kembali. Oleh karena itu, perlu sinergitas antar pihak terkait, khususnya Kodim 0402/OKI dengan Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penanganannya. Penelitian ini akan dituangkan ke tulisan ilmiah dalam bentuk

tesis dengan judul : Sinergitas Kodim 0402/OKI dengan Pemda Ogan Komering Ilir dalam Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Lahan Gambut dan Kabut Asap di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2015.

Penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir belum berjalan dengan optimal meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanganinya oleh berbagai instansi terkait, termasuk oleh Kodim 0402/OKI dengan Pemda Ogan Komering Ilir Hal ini diasumsikan masih belum sinerginya tindakan yang dilakukan antara Kodim 0402/OKI dengan Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penanganan bencana tersebut. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Pertama. Bagaimana sinergitas Kodim 0402/OKI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap pada tahun 2015 ? Kedua. Bagaimana penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun

2015 ? Penelitian ini bertujuan untuk : Pertama. Menganalisis sinergitas Kodim 0402/OKI dengan Pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap, kedua. Menganalisis penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah kabupaten Ogan Komering ilir pada tahun 2015.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, masalah penelitian dianalisis dengan teori sinergi dari Stoner dan Freeman (1992). Teori ini dipilih dengan alasan bahwa aspek-aspek yang dijelaskan pada teori tersebut dianggap dapat menjelaskan masalah penelitian sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan pada penjelasan konsep sinergi tersebut, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sinergi adalah suatu proses kerjasama antara beberapa pihak untuk memadukan gagasan, sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berorientasi pada proses dari hasil bersama dan tujuan bersama yang dapat menghasilkan jumlah yang lebih

besar daripada apabila diupayakan sendiri-sendiri.

Konsep Koordinasi dan Komunikasi dalam penelitian ini dipilih sebagai pendukung teori sinergitas dari Stoner & Freeman, 1992. Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien, disampaikan oleh Mooney (sebagaimana dikutip dalam Stoner & Freeman, 1992). Selain koordinasi, komunikasi merupakan aspek penting dalam mewujudkan sinergitas. Komunikasi menurut Sofyandi dan Garniwa (2007) dibedakan atas dua bagian, yaitu: 1). Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber : komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan; dan 2). Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya

koordinasi. Bungin (2006:257) menyatakan komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat didalamnya guna mencapai kesamaan makna.

Berdasarkan pengertian tersebut komunikasi dan koordinasi selalu diperlukan dalam suatu organisasi untuk keselarasan atau keterpaduan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dan koordinasi dalam mewujudkan sinergitas merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas antara Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kodim 0402/OKI dalam upaya penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para pejabat terkait mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Selain itu, Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2017 p. 25). Merujuk pada penjelasan tersebut, maka metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini akan mengkaji pihak-pihak yang berinteraksi, dalam hal ini Kodim 0402/OKI dengan Pemda Ogan Komering Ilir dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2015.

Pada penelitian kualitatif, sumber data yang dapat digunakan berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder, yaitu: Pertama. Data primer, yakni data-data atau informasi yang didapat secara langsung dari objek melalui wawancara dan observasi untuk mendapatkan deskripsi dan analisis terhadap penanganan kebakaran lahan

gambut dan kabut asap di Kabupaten OKI; dan Kedua. Data sekunder, yakni data-data atau informasi tambahan yang didapat melalui kajian kepustakaan, seperti hasil-hasil penelitian yang sejenis, dokumentasi, berita media massa, dan literatur-literatur relevan lainnya terkait dengan penanganan kebakaran lahan gambut dan kabut asap di Kabupaten OKI pada tahun 2015. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pejabat-pejabat terkait di instansi Kodim 0402/OKI dan Aparat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terutama yang terkait dengan penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap dan anggota Manggala Agni. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian yaitu sinergitas Kodim 0402/OKI dan Pemda OKI dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di Kabupaten OKI pada tahun 2015..

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui: Pertama. Pengamatan/Observasi. Peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur dan tersamar; Kedua. Wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab secara

bertatap muka antara peneliti dengan subyek. Peneliti melaksanakan pengumpulan data dari beberapa sumber dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*; Ketiga. Studi Pustaka/Literatur, merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pengadopsian teori-teori dan analisa data penelitian sejenis serta data yang diangkat dan diberitakan melalui media massa serta literatur-literatur yang relevan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Proses analisis data ini akan menempuh tahapan sebagai berikut: Pertama. Reduksi Data; Kedua. Penyajian Data; dan Ketiga. Penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sinergitas Kodim 0402/OKI dan Pemda OKI dalam Penanganan Kebakaran Lahan Gambut dan Kabut Asap

Kebakaran lahan dan bencana kabut asap yang terjadi di tahun 2015 merupakan salah satu yang terbesar setelah bencana tahun 1997. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) termasuk wilayah yang mengalami

kebakaran lahan dan kabut asap terparah. Titik api yang memicu kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten OKI lebih banyak dari daerah lainnya. Kebakaran lahan dan kabut asap yang terus terjadi setiap tahun di Kabupaten OKI, menunjukkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang selama ini dilaksanakan belum optimal.

Stoner dan Freeman (1992:85) menjelaskan bahwa sinergi dilihat dari sudut organisasi merupakan tindakan bekerjasama dan saling berhubungan antara bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi dan hasilnya akan menjadi lebih produktif dibandingkan bertindak sendiri-sendiri. Unsur-unsur yang mendukung sinergi menurut Stoner dan Freeman (1992:85) adalah : a. Mempunyai tujuan; b. Berorientasi pada hasil bersama; c. Hasil bersama lebih besar daripada penjumlahan dari hasil masing-masing. Sinergitas antara Kodim 0402/ OKI dengan Pemda OKI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pencegahan maupun penanganan kebakaran lahan dan bencana kabut asap. Penanganan darurat bencana kebakaran di Kab. OKI dilakukan bersama antara Kodim 0402/OKI dengan

Pemda Kab. OKI. Dalam hal ini, Pemda dan Kodim 0402/OKI dapat mendorong peran masing-masing dengan mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu keberhasilan penanganan kebakaran lahan dan kabut asap di wilayah Kabupaten OKI.

Komponen tujuan bersama dijadikan tolok ukur sinergi antara Kodim 0402/OKI dan Pemda OKI dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah Kabupaten OKI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan sudah cukup baik dimana di antara tiap instansi sudah memiliki kesamaan tujuan yaitu menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran tersebut, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

Dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah Kabupaten OKI, diperlukan sumber daya pendukung personel dalam melakukan penanganan kebakaran lahan dan kabut asap. Alat perlengkapan yang

diperlukan untuk penanganan kabut asap masih terbatas. Sebagian besar personel menggunakan alat tradisional untuk melakukan pemadaman titik api. Tidak lengkapnya Alkap menjadikan pengerahan sumber daya manusia yang ada menjadi tidak optimal. Selain itu, bisa saja pemadaman yang seharusnya dapat dilakukan oleh satu orang dengan menggunakan alat yang tepat menjadi harus dilakukan oleh banyak orang dengan tidak menggunakan alat yang memadai. Secara kuantitas alat tradisional yang ada tentunya tersedia. Namun bila memperhitungkan kebutuhan alat yang lebih modern justru secara kuantitas masih jauh dari jumlah yang diharapkan. Dengan demikian maka dilihat dari komponen tujuan bersama dan sumber daya, sinergitas antara Pemda dan Kodim telah terbentuk dan terjalin dengan baik, namun kendala keterbatasan Alkap berkaitan dengan sumber daya lainnya sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi kurang efektif.

Bungin (2006:257) menyatakan komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang

terlibat didalamnya guna mencapai kesamaan makna. Komunikasi sangat penting dijadikan sebagai tolak ukur sinergitas antara Pemda dan Kodim karena dalam penanganan kebakaran lahan di Kabupaten OKI melibatkan individu-individu dari instansi yang berbeda-beda. Instansi yang biasanya terlibat dalam penanganan kebakaran lahan dan kabut asap terdiri dari pemerintah daerah, Kodim, Polri, BPBD, Manggala Agni bahkan melibatkan perusahaan perkebunan dan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi seluruh pihak yang terlibat akan bekerja sendiri-sendiri tidak terkoordinasi sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif.

Dilihat dari komponen komunikasi, sinergitas antara Kodim dan Pemda menunjukkan kondisi yang cukup positif. Penyaluran informasi antara Kodim dengan Pemda selama ini sudah berjalan dengan menggunakan media sosial berupa WA, Telegram, Telepon dan HT. Penyaluran informasi mengenai kebakaran lahan dilaksanakan secara berjenjang, dimana informasi awal disalurkan dari satelit dari BPBD kepada Dandim dan Danramil atau informasi awal berasal dari masyarakat disampaikan kepada Dandim dan Danramil.

Kejelasan informasi, konsistensi penyampaian informasi cukup baik lewat Pemda, Camat dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran. Dengan demikian, dilihat dari komponen komunikasi sinergitas antara Kodim dan Pemda OKI telah terjalin dengan baik dimana komunikasi diantara keduanya berjalan dengan timbal balik sehingga dapat menghindari terjadinya miskomunikasi dalam penanganan kebakaran lahan dan kabut asap.

Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien, disampaikan oleh Mooney (sebagaimana dikutip dalam Stoner & Freeman, 1992). Komponen koordinasi menjadi pertimbangan dalam penilaian sinergitas antara Kodim dengan Pemda OKI karena koordinasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan keserasian dan kekompakan agar tercipta hubungan kerjasama yang efektif dan efisien. Koordinasi yang terjalin antar instansi dalam penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap

belum optimal karena BPBD sebagai leading sector terlihat kewalahan dalam mengkoordinir pelaksanaan penanganan darurat bencana Karhutlah, setiap instansi yang terkait telah berusaha bertindak sesuai dengan bidang masing-masing dan berkoordinasi dengan instansi lainnya. Namun harus diakui bahwa masih banyak ditemukan kendala yang ditimbulkan oleh tingkat kesulitan penanganan kebakaran yang cukup berat. Dengan demikian, komponen koordinasi menunjukkan bahwa sinergitas antara Kodim dan Pemda OKI belum optimal.

Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Lahan dan Kabut Asap di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta

menciptakan perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebakaran lahan dan kabut asap di Kabupaten OKI merupakan peristiwa yang terus berulang setiap memasuki musim kemarau. Kejadian pada tahun 2015 merupakan peristiwa yang cukup besar. Pada saat itu jumlah titik api makin tak bisa terkontrol, luasan wilayah terdampak kabut asap pun makin luas. Pemerintah bukan tak punya strategi, namun jika dibandingkan sumber daya yang dimiliki dengan jumlah titik kebakaran hutan, jelas menjadi sangat tak berimbang. Dari ribuan hektare lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir inilah pekatnya kabut asap terbawa hingga ke Riau, Jambi, Medan, bahkan Banda Aceh dan Negara tetangga.

Apa yang menjadi upaya pemerintah daerah selama beberapa bulan untuk bebas dari bencana kabut asap di 2015 tak berjalan mulus. Kabut asap memenuhi atmosfer Kota Palembang dan wilayah kota lainnya. Kabut asap yang menyesakkan pernafasan itu berasal dari titik api di sekitar lahan gambut di Kabupaten OKI. Oleh karenanya sangat tidak relevan bila dikatakan bahwa pada tahun 2015 penanganan kebakaran lahan gambut

dinilai lambat, karena kejadiannya serempak sehingga Pemda, Kodim, Polres dan BPBD terdadak, perencanaan belum optimal, tidak terprediksi, peralatan belum memadai, dan dana alokasi khusus kebakaran belum siap.

Hal ini justru menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan mitigasi kurang maksimal. Upaya pencegahan seharusnya dapat memberikan dampak sekecil apapun agar terjadi pengurangan resiko dan ancaman terjadinya kebakaran lahan dan kabut asap. Mitigasi bencana kebakaran lahan dan kabut asap setidaknya dapat meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi yang pernah terjadi sebelumnya. Kebakaran lahan tahun 2015 merupakan kejadian kebakaran yang lebih besar dibandingkan dengan yang pernah terjadi pada tahun 1997. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran lahan yang dilakukan tidak efektif, atau bahkan mungkin hal tersebut tidak dilaksanakan.

Lahan gambut yang sangat luas dan lokasinya jauh dari pemukiman serta tidak adanya akses jalan menyulitkan upaya-upaya penanganan. Lahan gambut yang memiliki kedalaman mencapai 4 s.d 8 meter

sangat menyulitkan upaya pemadaman api. Akses jalan yang minim menuju ke daerah tempat timbulnya hot spot menyulitkan pemadaman sehingga kebakaran cepat meluas. Selain itu, terjadi kebakaran biasanya pada musim kemarau. Saat musim kemarau ketersediaan air tanah yang dapat dipergunakan untuk pemadaman sangat sedikit bahkan terkadang sumber air jauh dari lokasi kebakaran.

Di sisi lain kondisi masyarakat secara sosial budaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kebakaran lahan dan kabut asap. Tradisi masyarakat buka lahan dengan cara membakar untuk tanam padi (Sistem Sonor) sulit untuk dihilangkan hal ini juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi dimana sistem Sonor tersebut memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan karena hemat biaya. Upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan buka lahan dengan sistem sonor sulit untuk dilakukan karena adanya nilai ekonomis yang menguntungkan tersebut. Pembukaan lahan dengan cara pembersihan memakan biaya yang lebih besar daripada sistem sonor. Keterbatasan dana membuat masyarakat lebih memilih

cara yang lebih murah dalam membuka lahan dengan cara membakar lahan.

Tindakan hukum bagi yang membakar belum terlaksana karena kesulitan menangkap pelaku sebab masyarakat tidak melaporkan siapa yang melakukan pembakaran lahan. Upaya yang dilaksanakan Kodim 0402/OKI untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut yaitu dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi stiker bahaya kebakaran, membentuk group Karhutla, melaksanakan patroli bersama BPBD dan perusahaan perkebunan. Babinsa aktif laksanakan sosialisasi ke desa-desa dan melaksanakan patroli kebakaran. Pengawasan juga sulit dilaksanakan karena luas wilayah lahan yang berpotensi untuk kebakaran sangat luas. Masyarakat sendiri belum peduli akan bahaya kebakaran dan dampaknya.

Perencanaan yang baik merupakan komponen penting dalam penanganan darurat bencana. Standard Operational Procedure (SOP) perlu disusun dengan memperhatikan kapasitas serta proses yang diperlukan dalam penanganan kebakaran lahan dan kabut asap. Kecermatan dalam menentukan SOP

sangat diperlukan. Kesalahan dalam menentukan SOP dapat menjadikan pelaksanaan di lapangan terganggu. Untuk itu dalam penyusunan SOP perlu melibatkan banyak pihak. Penyusunan SOP secara sepihak akan menimbulkan penolakan yang pada akhirnya menghambat dalam implementasinya.

Pada awalnya pelaksanaan penanganan kebakaran lahan gambut dan kabut asap di Kabupaten OKI pada tahun 2015 dilaksanakan dengan berdasarkan Protap masing-masing instansi yang lebih bersifat internal dan belum terpadu sehingga hasilnya kurang optimal. Namun pada akhirnya dibentuk organisasi penanganan penanggulangan bencana dimana Dandim berposisi sebagai Dansubsatgas walaupun pada bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap pengoperasionalan SOP bersama ini agak terlambat sehingga hasilnya kurang optimal

Penanganan darurat bencana harus dilaksanakan secara menyeluruh, dalam hal ini Kodim 0402/OKI dan Pemda OKI telah berupaya untuk melaksanakan penanganan secara menyeluruh terlihat dari upaya pemadaman kebakaran yang dilakukan dan

juga upaya untuk mengurangi kerugian dan penderitaan yang dialami masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut, seperti evakuasi warga yang menetap di sekitar lokasi kebakaran, pengobatan kepada masyarakat yang terkena penyakit akibat kabut asap yang ditimbulkan, serta upaya menghentikan pembakaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan sesuai bidang masing-masing.

Upaya penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah Kabupaten OKI pada tahun 2015 sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak, pada saat itu banyak sekali pihak yang bersimpati dan merasa turut memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama untuk membantu mengurangi penderitaan masyarakat yang terkena dampak bencana, baik itu dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten OKI maupun dari donatur dan para dermawan yang memberikan bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan dan lain-lain.

Kodim 0402/OKI dan Pemda OKI memiliki sinergi dengan adanya tujuan yang sama dalam penanggulangan bencana kebakaran, sumber serta komunikasi yang

terjalin dengan baik. Hal ini berfungsi untuk mengatasi keterbatasan akan Alat pemadam kebakaran dan luasnya wilayah tanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran lahan. Disisi lain, Kodim 0402/OKI dan Pemda Kab. OKI menghadapi ancaman berupa kondisi geografis dan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten OKI serta cuaca/ El nino yang tidak menguntungkan disertai dengan masih lemahnya penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diketahui bahwa dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat kendala yang dimiliki oleh Kodim 0402/OKI dan Pemda Kab. OKI. Kendala yang berasal yang bersifat eksternal (kondisi alam) dan internal (keterbatasan Kodim 0402/OKI dan Pemda OKI). Kendala yang bersifat eksternal dapat ditekan atau diminimalkan apabila Kodim dan Pemda dapat mengatasi kendala internal mereka. Oleh karena itu, perlu meningkatkan sinergi dalam mengatasi kendala SDM yang ada di Kodim 0402/ OKI dan Pemda dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kab. OKI.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama. Sinergitas Kodim 0402/OKI dengan Pemda Kabupaten OKI dalam penanganan darurat kebakaran lahan gambut dan kabut asap pada tahun 2015 telah dilakukan dalam suatu bentuk kerjasama dan komitmen dalam menciptakan situasi wilayah yang terbebas dari ancaman kebakaran lahan, dimana masing-masing pihak telah menjalankan tugasnya. Namun demikian, berbagai upaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan Kodim 0402/OKI dan Pemerintah Daerah masih terkendala dengan berbagai hal, sehingga penanganannya masih belum optimal. Hal ini terkendala dengan masih belum optimalnya koordinasi antar instansi, belum memadainya peralatan yang dibutuhkan pada saat penanganan bencana kebakaran, masih belum adanya SOP yang baku dalam penanganan bencana kebakaran hutan di wilayah Kabupaten OKI, masih belum optimalnya kesiapsiagaan dari Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran hutan,

dan masih minimnya data tentang potensi wilayah yang memiliki kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Karakteristik wilayah Kabupaten OKI menyimpan potensi bencana kebakaran lahan yang besar. Kondisi geografis Kabupaten OKI sebagian besar merupakan lahan perkebunan dan lahan gambut yang mudah menjadi pemicu timbulnya hot spot, terutama pada musim kemarau; dan Kedua. Penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2015 menuai cukup banyak tanggapan dari berbagai pihak baik itu tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Dengan kekuatan yang dimiliki Kodim 0402/OKI maupun Pemda Kabupaten OKI serta dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang terjadi selama ini, maka strategi yang dianggap relevan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menekan dan mengatasi bencana kebakaran yang akan datang. Langkah inovatif yang dapat direalisasikan diantaranya adalah dengan penyusunan kebijakan berupa peraturan daerah tentang larangan dan pembatasan

pembukaan lahan melalui pembakaran, menerapkan metoda pembukaan lahan tanpa pembakaran, penyediaan alat pemadam kebakaran yang memadai dan yang paling penting adalah meningkatkan sinergitas Kodim 0402/OKI dan Pemda OKI dalam penanganan darurat bencana Karhutlah dengan cara antara lain yaitu menyusun Peraturan daerah atau Peraturan Bupati mengenai sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan; Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya; Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota; Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta melaksanakan pengendalian ke bakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya; Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan

pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya; Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Gubernur.

Kodim 0402/OKI menjalankan perannya untuk memberikan bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; menjadi pelaksana dari upaya-upaya Pemda dalam mengatasi kebakaran lahan. Dengan memanfaatkan lembaga koordinasi yang ada, kerjasama antara Kodim dan Pemda OKI dapat ditingkatkan. Selanjutnya teknik dan mekanisme kerja antara Kodim dan Pemda disusun dalam suatu bentuk Standard Operational Procedure (SOP) penanganan kebakaran lahan. Dengan adanya Standard Operational Procedure (SOP), ada kewajiban bagi suatu instansi untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi lainnya. Hal ini penting karena masyarakat di Kabupaten OKI memiliki kebiasaan untuk membuka lahan dengan sistem Sonor (membakar lahan).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka Peneliti mengajukan Saran yang bersifat Teoritis dan Praktis. Saran Teoritis berupa: Pertama. Perlu adanya pengembangan

penelitian-penelitian yang terkait tentang penanganan darurat bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di kabupaten OKI karena karakteristik lahan gambut di kabupaten OKI yang sangat sulit untuk dipadamkan memerlukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasinya; dan Kedua. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat keterlibatan komponen lain yang ada di Kabupaten OKI yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap. Sedangkan Saran Praktis berupa: Pertama. Perlu disusun dan diimplementasikan SOP tentang keterlibatan Kodim dalam penanggulangan bencana di daerah; kedua. Pemerintah daerah perlu membentuk Satgas terpadu yang melibatkan seluruh instansi di daerah yang diwadahi dalam Pusdalops penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kabut asap; ketiga. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini akan dampak dan ancaman dari kebakaran lahan; keempat. Perlu dilakukan sosialisasi metode pembukaan lahan tanpa bakar yang bersifat ekonomis dan ramah lingkungan oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait; kelima. Perlu dibuat program

kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun oleh Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk mencegah dan menangani kebakaran lahan di kabupaten OKI; dan keenam. Aparat kepolisian dan aparat hukum lainnya diharapkan dapat melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya dan melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan agar menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang biasa melakukan pembakaran lahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bungin, Burhan H.M, (2008), *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Kencana
Departemen Pertahanan RI. (2015) *Buku Putih pertahanan Indonesia 2015*
Hermon, Dedi. (2014). *Geografi Bencana Alam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Nurjanah, et al. (2013) *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
Moekijat. (1994) *Koordinasi : Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju
Mulyana, Deddy (2016) *Ilmu Komunikasi suatu pengantar*. Bandung : Remaja Rosda Karya
TNI AD, (2009) *Buku Pedoman Penanggulangan Bencana Alam di darat*, No Perkasad/96/ XI / 2009 tanggal 30 Nopember 2019. Jakarta : Mabesad.
Stoner, J. A, Freeman, R. E (1992). *Manajemen* Jakarta: Intermedia

Sugiyono, (2017) *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif - R&D*. Bandung : Alfabeta.

TNI AD, (2011), *Sinergitas TNI Angkatan Darat dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2004-2010*, Bandung, Dinas Sejarah Angkatan Darat

Toisutta, G. (2009), *Peran TNI AD dalam penanggulangan bencana alam*, Jurnal Yudhagama Nomor 85 Tahun XXIX Edisi Desember 2009 , Jakarta, Dispenad

Unhan.(2014). *Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan*.

Karya Tulis Ilmiah

Hidayah, Nursanti (2016). *Tesis perubahan lanskap ekologi taman nasional tesso nilo dan sistem sosial ekonomi masyarakat lokal akibat ekspansi kelapa sawit di propinsi riau*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor), h. 3 diakses dari

repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/82606/1/2016nhi.pdf tanggal 18 Mei 2017

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development)*. Jurnal Ketransmigrasian No 28. Vol .2. Desember, pp.113-124 diunduh dari <http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH (30 Mei 2017).

Putra, Insita (2010), *Keterkaitan penanggulangan bencana dan pertahanan negara*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/4577323>

3/Penanggulangan-Bencana-Dan-Pertahanan-Negara 17 Mei 2017

Widjanarko, Widya (2016). *Peran Satuan Denzipur 8/Gawi Manuntung dalam rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Gambut di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015*

Undang-Undang Dan Peraturan

Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana

Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

INPRES RI (2011) Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Nomor 16 Tahun 2011.

PerMenhan RI, 2011 *Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di daerah* Nomor 35 Tahun 2011

Media Online

Abdullah, Yudi (2015) *Bencana Asap - Titik panas terbanyak di Ogan Komering Ilir* diakses dari

<http://www.antaranews.com/berita/522137/bencana-asap--titik-panas-terbanyak-di-ogon-komering-ilir>

Artharini, Isyana (2015) *Siapa 'aktor' di balik pembakaran hutan dan lahan?* diakses dari

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150923_indonesia_pembakaranlahan

Budi dan Dwipayana (2015) *Pemprov Sumsel Gagal dan Lambat Menangani Asap serta Evakuasi Warga* diakses dari

<http://maklumatnews.com/pemprov-sumsel-gagal-dan-lamban-menangani-asap-serta-evakuasi-warga/>

- BPBD Sumsel Rencana Strategis 2013-2018
diakses dari
bpbd.sumselprov.go.id/renstra/.../rencana-strategis-bpbd-provinsi-sumatera-selatan-20...
- Erlangga, Aulia (2015) *Menghalau kabut asap: Sebab dan dampak kebakaran lahan* diakses dari
<http://blog.cifor.org/37479/menghalau-kabut-asap-sebab-dan-akibat-kebakaran-lahan?fnl=id>
- Irwanto (2012) *Kerusakan hutan di Indonesia* diakses dari
https://www.irwantoshut.com/kerusakan_hutan_indonesia.html
- Mappapa, Liberti (2015, Oktober) *Majalah Detik (Edisi 202)*
- Prabowo, Dani (2015) *Ini Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Musibah Asap sebagai Bencana Nasional* diakses dari
<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/16/12153091/Ini.Alasan.Pemerintah.Tak.Tetapkan.Musibah.Asap.sebagai.Bencana.Nasional>.
- Syahayani, Zihan (2015) *Kebakaran Hutan Berulang, Tanggung Jawab Siapa?* diakses dari
<http://www.theindonesianinstitute.com/kebakaran-hutan-berulang-tanggung-jawab-siapa/>
- Wijaya, Taufik (2014) *Mengapa Kebakaran Lahan Gambut di Sumsel Tak Kunjung Usai? Inilah Ulasannya* diakses dari
<http://www.mongabay.co.id/2014/10/09/mengapa-kebakaran-lahan-gambut-di-sumsel-tak-kunjung-usai-inilah-ulasannya/>
- Al Farouq, Habibullah (2014) *Macam-Macam Ancaman Non Militer dan Penjelasannya* diakses dari
<http://www.habibullahurl.com/2016/04/macam-macam-ancaman-non-militer.html>